

CEPF Final Project Completion Report

Organization Legal Name:	JAPESDA Gorontalo
Project Title:	Penyiapan Masyarakat untuk Pengelolaan Mangrove & Sumberdaya Pesisir Berkelanjutan
Grant Number:	66433
CEPF Region:	Wallacea
Strategic Direction:	4 Strengthen community-based action to protect marine species and sites
Grant Amount:	\$89,783.65
Project Dates:	February 01, 2017 - September 30, 2019
Date of Report:	November 28, 2019

Implementation Partners

List each partner and explain how they were involved in the project

DKP Provinsi Sulteng :
Dinas Kehutanan Provinsi Sulteng :
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai :
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai :
Bappeda Kabupaten Banggai :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai :
Universitas Negeri Gorontalo :
Universitas Muhammadiyah Gorontalo :
Pemerintah Kecamatan Luwuk Timur :
Pemerintah Kecamatan Pagimana :
Polsek Pagimana :
Polsek Luwuk Timur :
Koramil Pagimana :
Koramil Luwuk Timur :
Pemerintah desa Uwdikan :
Pemerintah desa Lambangan :
BPD desa Lambangan :
BPD desa Uwedikan :
Kelompok Pemuda Karang Taruna desa Lambangan :
Kelompok Pemuda Karang Taruna desa Uwedikan :
Kelompok DPL sekaligus anggota nelayan desa Uwedikan :
Kelompok DPL sekaligus anggota Nelayan desa Lambangan :

Sikap Institut Palu :Sebagai mitra komunikasi dan jaringan program CPEF
Relawan Orang dan Alam (ROA) Palu : Sebagai mitra komunikasi dan jaringan program CPEF
Perkumpulan Salanggar : Sebagai mitra komunikasi dan jaringan program CPEF
Banggai Heritage : Sebagai mitra komunikasi dan jaringan program, disisi lain dalam pelaksanaan program, beberapa individu terlibat secara langsung pada pelaksanaan proyek dan mitra komunikasi untuk untuk perencanaan kegiatan.

Conservation Impacts

Summarize the overall impact of your project, describing how your project has contributed to the implementation of the CEPF ecosystem profile

Penyiapan Masyarakat dalam pengelolaan mangrove dan sumberdaya pesisir berkelanjutan pada implementasi program CEPF telah memberikan kontribusi besar terhadap keberlangsungan pengelolaan sumberdaya alam, khususnya untuk 2 desa wilayah program dikabupaten Banggai. Sejak Sosialisasi awal program sampai pada tahap membangun kesepakatan-kesepakatan wilayah konservasi dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut berkelanjutan, dukungan berbagai pihak telah banyak memberikan hasil yang cukup signifikan. Dampak yang sangat signifikan adalah disepakatinya luasan area zona konservasi Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat, dengan luas total keseluruhan di 2 (dua)desa program seluas: 93.92 ha desa Lambangan dan 651.15 ha desa Uwedikan dari rencana awal pada program, hanya seluas 100ha untuk 2 (dua) desa. Hasil ini juga didukung dan ditopang dengan berbagai kegiatan awal yang telah dilaksanakan. Hasil awal yang dicapai untuk mendukung kesepakatan area konservasi tidak lepas dukungan dari seluruh stakeholder, baik didesa, kecamatan, kabupaten dan stakeholder ditingkat provinsi. Membangun jaringan dan komunikasi dengan berbagai pihak adalah salah satu bentuk kegiatan yang berhasil mendukung capai-capaian program. Hasil yang dapat dirangkum dalam capaian project adalah :

- Kontribusi pemerintah desa dan BPD terhadap legalitas zona konservasi dan pembentukan kelompok/badan pengelola DPL yang menghasilkan Surat Keputusan/SK kepala desa dan Rancangan Perdes tentang Zonasi dan Pengelolaan DPL atau nama lain KKP (Kawasan Konservasi Perairan) dan saat ini Rancangan Perdes telah ditetapkan dan diberlakukan dimasing-masing desa program
- Mendorong Kontribusi dan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dalam hal ini Bupati Banggai yang memerintahkan pemerintah desa untuk mengalokasikan Dana Desa pada pengelolaan lingkungan hidup dan mendukung wilayah konservasi yang sudah disepakati.
- Membangun jaringan dan komunikasi dan berhasil mendorong berbagai pihak terkait untuk terlibat dan berkontribusi pada program, mulai dari pihak ditingkat desa sampai pada stakeholder diprovinsi.
- Mendorong pihak aparat penegak hukum untuk mensuport wilayah konservasi dari kegiatan-kegiatan yang merusak dengan turut menandatangani kesepakatan masyarakat dan pemerintah desa terkait pengelolaan zonasi didesa Lambangan dan Uwedikan
- Meningkatkan hasil tangkapan nelayan terutama diwilayah desa Lambangan dan Uwedikan dalam beberapa bulan terakhir dan benar-benar dirasakan oleh nelayan sendiri terutama para pemancing, hal ini terjadi karena berhasil menekan aktifitas pengambilan karang dan aksi pemboman ikan di2 (dua) wilayah desa tersebut yang sering dilakukan oleh warga dari luar

desa yang memang selama ini aksi bom ikan, potasium dan pengambilan karang serta kayu mangrove sangat masif terjadi.

- Meningkatkan tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat dan pemerintah desa terkait pengelolaan sumberdaya pesisir dengan kontribusi dan dukungan terhadap pembentukan wilayah konservasi didesa mereka.
- Ada dorongan pemerintah kecamatan dan instansi terkait untuk mereplikasi kegiatan didesa lain dan permintaan beberapa desa tetangga untuk mendukung program yang sama, terkait konservasi pesisir didesa mereka.
- Mendorong dukungan dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya rehabilitasi terumbu karang didesa Uwedikan yang telah dilaksanakan bersama pada tahun 2018, dan dinas Perikanan kabupaten untuk dukungan fasilitas alat tangkap bagi kelompok nelayan didesa Uwedikan dan Lambangan.
- Menekan kegiatan ilegal fishing terutama di 2 wilayah kecamatan dan mendorong kontribusi pemerintah daerah untuk mempublikasikan/kampanye terhadap persoalan lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dengan dukungan pihak kepolisian disektor kecamatan Pagimana dan Luwuk Timur terhadap pemberantasan kegiatan ilegal fishing serta publikasi lingkungan yang dilakukan pihak pemerintah daerah dalam hal ini dilakukan oleh instansi terkait.
- Perda RZWP3K propinsi Sulawesi Tengah telah mengakomdir wilayah desa Uwedikan masuk dalam perencanaan wilayah konservasi (Perda terlampir)
- Wilayah pesisir Desa Lambangan telah mendapat rekomendasi untuk masuk dalam area konservasi DPL (Rekomendasi terlampir)
- Dukungan pengembangan 1 unit usaha KJA dari Pemerintah desa untuk kelompok DPL desa Lambangan melalui dana Alokasi Desa (ADD) dan telah direalisasikan pada tahun 2018
- Dukungan untuk pengembangan wisata Tracking Mangrove didesa Lambangan dari pemerintah desa melalui dana ADD

Planned Long-term Impacts - 3+ years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
Creation of two separate MPAs will improve the overall management of the Togeang-Banggai marine corridor.	Program “Penyiapan masyarakat dalam pengelolaan Mangrove dan sumberdaya pesisir berkelanjutan” adalah sebuah perencanaan jangka panjang masyarakat dalam mengelola sumberdaya pesisir dan laut dalam sebuah wilayah desa dengan tujuan, dikelola berdasarkan kesepakatan masyarakat lokal dengan mangacu pada kebijakan pemerintah yang berpihak pada masyarakat dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, kegiatan ini dilakukan dengan berbagai metode kegiatan, mulai dari kegiatan sosialisasi program, survei kondisi sumberdaya alam dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, diskusi dan penguatan kapasitas baik ditingkat masyarakat dan pemerintah. Hasil dari keseluruhan proses kegiatan adalah terciptanya sebuah wilayah konservasi DPL di 2 (dua) desa koridor laut Togeang-Banggai berdasarkan

	<p>musyawarah dan kesepakatan masyarakat bersama pemerintah setempat, dengan dukungan kebijakan berupa SK (Surat Keputusan) kepala desa, Penetapan PERDES tentang Pengelolaan DPL yang didukung juga oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten serta integrasi PERDA RZWP3K. Dengan adanya kebijakan pemerintah baik lokal maupun Propinsi tentu akan berpotensi besar meningkatkan keberlanjutan jangka panjang pengelolaan kawasan konservasi di wilayah tersebut</p>
--	--

Planned Short-term Impacts - 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)

Impact Description	Impact Summary
1. Create a 50 hectare MPA in Lambangan.	<p>Dalam perencanaan awal terkait pengembangan wilayah DPL didesa Lambangan yang direncanakan seluas 50 ha, ternyata melebihi target yang rencanakan. Hasil ini berdasarkan kesepakatan dan musyawarah desa yang dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan, mulai dari pertemuan tingkat dusun, pertemuan dengan komunitas nelayan dan musywarah tingkat desa. Hasil akhir perencanaan wilayah konservasi didesa Lambangan berdasarkan musyawarah bersama masyarakat dan pemerintah desa adalah seluas 93.92 ha. Dengan rincian sbb : Zona inti : seluas 40.55 ha. Zona Penyangga : seluas 36.93 ha. Zona Pemanfaatan berkelanjutan seluas : 8.40 ha. Zona Rehabilitasi seluas : 8.04 ha. Musyawarah desa juga memutuskan adanya kesepakatan pembentukan kelompok atau badan pengelola DPL. Pembentukan kelompok pengelola DPL dikukuhkan dengan Surat Keputusan kepala desa Lambangan nomor 03 tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2018 dan turut ditandatangani oleh Camat, Kapolsek dan Koramilkecamatan Pagimana. SK kepala desa pada akhirnya juga diperkuat dengan penetapan Perdes pengelolaan DPL. Kesepakatan pengelolaan DPL desa Lambangan juga diperkuat dengan Surat Rekomendasi DKP provinsi Sulawesi Tengah tentang penetapan kawasan konservasi DPL didesa Lambangan</p>
2. Create a 50 hectare MPA in Uwedikan	<p>Dari perencanaan awal terkait pengembang wilayah DPL didesa Uwedikan yang direncanakan seluas 50 ha, ternyata juga melebihi target yang rencanakan. Hasil ini berdasarkan kesepakatan dan musyawarah desa yang dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan, mulai dari pertemuan tingkat dusun, pertemuan dengan komunitas nelayan dan musywarah tingkat desa. Hasil akhir perencanaan wilayah konservasi didesa Uwedikan berdasarkan musyawarah bersama masyarakat dan</p>

	<p>pemerintah desa adalah seluas 651.15 ha. Dengan rincian sbb : Zona inti : seluas 31.58 ha. Zona Penyangga : seluas 100.40 ha. Zona Pemanfaatan berkelanjutan seluas : 448.81 ha. Zona Rehabilitasi seluas ; 3.04 ha. Zona Pariwisata : seluas 67.32 ha. Musyawarah desa Uwedikan juga memutuskan adanya kesepakatan pembentukan kelompok atau badan pengelola DPL. Pembentukan kelompok pengelola DPL dikukuhkan dengan Surat Keputusan kepala desa Lambangan nomor 03 tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2018 dan turut ditandatangani oleh Camat, Kapolsek dan pihak Koramil kecamatan Luwuk Timur. Kesepakatan pengelolaan DPL desa Uwedikan juga diintegrasikan dengan penetapan Perda RZWP3K provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018-2023. Sebelumnya Uwedikan juga sudah masuk dalam area pencadangan Kawasan Konservasi Laut Daerah</p>
<p>3. Improve the knowledge of 500 people in two villages about the importance of marine and mangrove conservation</p>	<p>Pengorganisasian masyarakat dan penguatan kapasitas masyarakat lokal dilakukan dalam bentuk pertemuan-pertemuan dan diskusi kampung serta kegiatan Pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait konservasi wilayah pesisir dan laut. Kegiatan pertemuan oleh pendamping dan difasilitasi bersama program manager, baik secara formal dalam bentuk pertemuan dan pelatihan, juga diskusi-diskusi non formal yang juga difasilitasi bersama pemerintah desa. Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait dengan laut dan konservasi mangrove secara detail dari akumulasi pelatihan di 2 desa sebanyak 127 orang, pertemuan kampung dan diskusi formal di 2 (dua) desa program yang dilakukan pendamping diakumulasikan dengan jumlah KK nelayan dan pemerintah desa di 2 desa program adalah sebanyak 151 orang serta diskusi non formal dan pertemuan-pertemuan musyawarah desa terkait perencanaan pengelolaan DPL mangrove lebih dari 250 orang. Kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat juga dilakukan dalam keikutsertaan masyarakat dan pemerintah desa dalam kegiatan survei dan rehabilitasi mangrove dan karang, pemetaan dan kajian desa partisipatif. Dampak peningkatan pengetahuan masyarakat terlihat dari peran masyarakat terhadap pelarangan dan tdk lagi memanfaatkan mangrove dan karang didesa</p>
<p>4. Train 20 people in improved livelihoods</p>	<p>Secara rinci pelaksanaan Pelatihan bagi 20 orang kelompok nelayan di 2 (dua) desa program ini terlampir dalam Laporan Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Usaha Budidaya Perikanan Ramah Lingkungan. Dalam</p>



	<p>pelatihan ini disamping dihadiri oleh anggota kelompok nelayan desa Uwedikan dan Lambangan, juga turut diikuti oleh perwakilan nelayan dari mitra program. Dalam pelaksanaan pelatihan kegiatan ini juga difasilitasi oleh DKP provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai. Dalam kegiatan sehari-hari praktek usaha Karamba Jaring apung juga sudah dilakukan oleh beberapa kelompok di desa Uwedikan, namun kegiatan yang dilakukan sedikit terkendala dengan modal usaha, terutama pakan dan pengadaan fasilitas KJA, sehingga rencana kegiatan usaha ini sedikit mengalami kendala. Untuk saat ini kelompok yang sudah dilatih sudah mendapat dukungan usaha pengembangan KJA di desa Lambangan dan pengembangan usaha Bagan tangkap di desa Uwedikan. Untuk desa Lambangan Pengembangan KJA disamping didukung oleh program CEPF juga mendapat support 1 unit KJA dari pemerintah desa melalui dana alokasi desa yang sudah diimplementasikan dari tahun 2018</p>
--	--

Describe the success or challenges of the project toward achieving its short-term and long-term impact objectives

Dalam mencapai tujuan project tentu ada keberhasilan dan tantangan dalam implementasi program. Hal ini tergantung dari kondisi dan situasi wilayah dan masyarakat yang merupakan bagian dari sasaran project. Salah satu tantangan sejak awal pelaksanaan project tidak lepas dari jangkauan dan kondisi medan kelokasi program. Namun hal ini bisa diantisipasi dengan dukungan jaringan komunikasi dan informasi yang cukup stabil serta dukungan rutinitas transportasi baik laut dan udara serta transportasi darat di dua wilayah, baik yang menghubungkan kabupaten Banggai dan Gorontalo, kecamatan Luwuk Timur dan kecamatan Pagimana sebagai lokasi program untuk 2 (dua) desa dampingan. Dari sisi sumberdaya baik manusia dan alam, tantangan yang sangat dirasakan adalah perilaku dan budaya merusak alam, namun ini terjadi karena lebih banyak dilakukan oleh warga masyarakat dari luar desa program. Kegiatan ilegal fishing, seperti bom ikan dan potasium seperti hal yang biasa dalam kehidupan disekitar warga desa. Pengambilan batu karang dan penebangan hutan mangrove seperti hal yang lumrah terjadi di desa. Kondisi ini dapat dirasakan saat awal membangun komunikasi bersama warga desa dampingan. Beberapa kelompok tertentu terutama di wilayah desa Uwedikan yang sering memanfaatkan hutan mangrove untuk diperjual belikan merasa terganggu dengan kehadiran program ini. Namun dengan proses pendampingan dan komunikasi intensif serta pendekatan dengan pihak-pihak tersebut dan melibatkan mereka secara langsung dalam kegiatan-kegiatan program di desa akhirnya bisa terbangun komunikasi yang baik dengan mereka. Beberapa dari para pelaku ilegal fishing juga akhirnya ikut terlibat dan masuk dalam kelompok badan pengelola DPL. Salah satu keberhasilan yang cukup signifikan selama pelaksanaan project adalah bisa menekan kegiatan para pelaku ilegal fishing dari luar desa dan sedikit merubah perilaku warga lokal untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang dilakukan secara merusak. Bahkan yang sangat getol dan cukup intensif bereaksi meredam kegiatan perusakan sumberdaya alam di 2 (dua) desa tersebut adalah warga nelayan yang tergabung dalam kelompok/badan Pengelola DPL, dan juga pemerintah desa. Keberhasilan lainnya adalah, program ini bisa mendorong pemerintah dari tingkat desa sampai ketinggian provinsi untuk bersama-sama memformulasikan implementasi program dalam sebuah

konsep pengelolaan konservasi laut dan pesisir berbasis masyarakat. Hal ini tentu tidak lepas dari komunikasi dan jaringan yang terus dibangun dengan berbagai pihak dalam setiap perencanaan kegiatan. Kehadiran dan kontribusi bupati dalam kegiatan Loka karya Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Berbasis masyarakat untuk mendorong pemerintah desa mendukung kegiatan konservasi lingkungan dengan mengalokasikan Dana Desa telah menjadi titik awal desa-desa di kabupaten Banggai dapat mengalokasikan dana desa untuk program konservasi lingkungan. Namun disisi lain tantangan yang dihadapi saat ini adalah masuknya investasi perusahaan-perusahaan tambak di kabupaten Banggai yang dikhawatirkan akan berdampak pada pembukaan lahan hutan mangrove di beberapa tempat lainnya. Dalam implementasi program keberhasilan yang paling sangat dirasakan adalah terbangunnya kesepahaman, kesepakatan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya wilayah konservasi, dengan konsep Kawasan Konservasi Perairan Berbasis Masyarakat yang didukung bersama seluruh stakeholder terkait. Kesepakatan ini tertuang dalam Surat Keputusan Kepala desa yang turut didukung dan ditandatangani oleh pemerintah Kecamatan, Kapolsek dan pihak aparat TNI yang berbasis didesa, serta penyusunan RANPERDES oleh BPD dan pemerintah desa terkait pengelolaan wilayah Zonasi dan penetapan kelompok/Badan Pengelola DPL. Dan saat ini Ranperdes Perdes tersebut telah ditetapkan dan diberlakukan di masing-masing desa program. Perdes ini juga didukung dengan adanya Perda Rencana Zonasi Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) propinsi Sulawesi Tengah untuk desa Uwedikan dan Rekomendasi Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tengah untuk desa Lambangan sebagai wilayah konservasi laut dan pesisir

Were there any unexpected impacts (positive or negative)?

Dampak yang tidak terduga dari pelaksanaan project adalah :

Hal positif :

Lahirnya bentuk kesepakatan terhadap luasan area zonasi dari perencanaan 100ha untuk 2 (dua) desa terakumulasi menjadi 744.57ha untuk 2 (dua) desa Program. Hal ini tidak lepas dari meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan mangrove dan sumberdaya laut didesa mereka. Proses pendampingan dan pengorganisasian masyarakat serta kegiatan-kegiatan penguatan kapasitas, terkait pentingnya mangrove dan terumbu karang dan pelatihan pengelolaan perikanan yang ramah lingkungan sangat berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat didesa. Hal ini juga didukung dengan kegiatan lain yang banyak melibatkan masyarakat dan pemerintah desa setempat, seperti membuat perencanaan desa dan pemetaan partisipatif secara bersama-sama, survei hutan mangrove, terumbu karang dan lamun. Salah satu yang sangat berperan dalam melahirkan kesepakatan wilayah konservasi adalah diskusi-diskusi kampung yang dilaksanakan secara rutin oleh pendamping desa. Kegiatan ini tentu banyak memberikan informasi dan masukan terhadap implementasi kegiatan.

Dukungan dinas Kelautan dan Perikanan untuk kegiatan rehabilitasi terumbu karang didesa Uwedikan yang telah diimplementasikan bersama pada tahun 2018, dukungan pemerintah desa untuk kelompok DPL desa Lambangan dalam pengembangan usaha budidaya KJA dan dukungan untuk pengembangan wisata tracking mangrove melalui alokasi Dana Desa telah memberikan kontribusi positif dan dampak yang signifikan terhadap program ini

Dukungan aparat penegak hukum dan kontribusi dalam beberapa kegiatan perencanaan ditingkat desa. Komunikasi intens yang terus diangun dengan semua pihak didesa dan kecamatan bersama aparat penegak hukum didesa dan ditingkat kecamatan telah mendorong keterlibatan penuh unsur kepolisian dalam beberapa kegiatan didesa. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kejadian dilapangan terkait kesepakatan-kesepakatan didesa dalam hal pengelolaan wilayah zonasi. Kegiatan



ilegal fishing yang banyak dilakukan pihak luar desa dapat memicu interaksi sosial yang negatif antar warga lokal dan pelaku ilegal fishing dari desa lainnya. Sehingga keterlibatan aparat penegak hukum sangatlah penting dalam implementasi program ini. Beberapa kebijakan yang telah lahir dari program ini telah memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pemerintah desa di 2 (dua) desa program CEPF

Hal Negatif :

Pada awal kesepakatan-kesepakatan pengelolaan zonasi di 2 (dua) desa program sedikit memicu kontradiksi antara warga luar desa dan kelompok Pengelola DPL. Karena kebiasaan pemanfaatan sumberdaya oleh warga luar desa selama ini , seperti pengambilan batu karang, penebangan pohon mangrove secara masiv sudah lama dan biasa dilakukan tanpa ada tindakan atau larangan baik oleh pemerintah desa dan aparat penegak hukum. Sehingga ketika kesepakatan ini mulai diterapkan dan disosialisasikan kedesa-desa tetangga sempat ada komplain dari para nelayan dari desa-desa tetangga. Komplain juga dilakukan oleh nelayan tangkap dari luar desa yang menggunakan alat tangkap yang merusak dan sempat beberapa kali ada insiden, namun hal ini dapat direda setelah ada penjelasan dari pihak Pengelola dan pemerintah desa. Serta keterlibatan pihak aparat penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian dimasing-masing kecamatan. Komunikasi dan sosialisasi dengan pemerintah tetangga juga dilakukan, sehingga hal-hal negatif ini dapat direda dan dipahami oleh pihak-pihak luar desa. Disisi lain pemerintah desa dan kelompok DPL bersama BPD juga telah melakukan sosialisasi terkait penetapan Perdes didesa mereka

Project Components and Products/Deliverables

Describe the results from each product/deliverable:

Component		Deliverable		
#	Description	#	Description	Results for Deliverable
1	Data collection in Lambangan and Uwedikan	1.1	PRA from Lambangan	Kegiatan PRA desa Lambangan dilaksanakan pada bulan april 2017, Hasil kajian PRA menjadi salah satu dasar masyarakat dalam menentukan kesepakatan pengelolaan DPL didesa Lambangan (laporan PRA sudah terlampir)
1	Data collection in Lambangan and Uwedikan	1.2	Community map from Lambangan	Kegiatan Pemetaan partisipatif desa Lambangan dilaksanakan pada bulan april 2017, Hasil kajian PRA menjadi salah satu dasar masyarakat dalam menentukan kesepakatan pengelolaan DPL didesa Lambangan. (laporan Pemetaan Partisipatif sudah terlampir)
1	Data collection in Lambangan and Uwedikan	1.3	PRA from Uwedikan	Kegiatan PRA desa Uwedikan juga dilaksanakan pada bulan april 2017, Hasil kajian PRA menjadi salah satu dasar masyarakat dalam menentukan kesepakatan pengelolaan DPL didesa Lambangan
1	Data collection in Lambangan and Uwedikan	1.4	Community map from Uwedikan	Kegiatan Pemetaan partisipatif desa Uwedikan juga dilaksanakan pada bulan april 2017, Hasil Pemetaan desa Partisipatif juggle menjadi salah satu dasar masyarakat dalam menentukan kesepakatan pengelolaan DPL didesa Lambangan
1	Data collection in Lambangan and Uwedikan	1.5	Document titled "Coastal and Marine Profile of Kabupaten Banggai"	Proses pendokumentasian hasil survei/kajian terhadap mangrove, terumbu karang dan lamun dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah produk dokument terkait profil pesisir dan laut kabupaten Banggai telah dilaksanakan sejak tahun 2017. Hasil kajian dimaksud telah dilaksanakan dan dilengkapi dengan laporan hasil kajian terhadap kondisi mangrove, lamun dan terumbu karang oleh masing-masing team survei sebagaimana dalam laporan yang sudah diserahkan dalam laporan sebelumnya. Hasil kajian ini dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti dengan pengadaan buku profil Mangrove yang sudah didistribusikan kemasing-masing mitra terkait (Buku profil terlampir). Hasil kajian terhadap sumberdaya alam laut dan pesisir ini juga telah dipresentasikan pada loka karya Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut berbasis masyarakat yang dilaksnakan didua desa dan juga ditingkat kabupaten.
2	Awareness, capacity building, and training	2.1	Baseline and final report on awareness in Lambangan	Proses peningkatan pengetahuan masyarakat dilakukan melalui kegiatan pendampingan dan pengorganisasian masyarakat. Secara rinci laporan peningkatan pengetahuan masyarakat di desa Lambangan dan

			and Uwedikan	Uwedikan termuat dalam lampiran Laporan “Pengorganisasian dan Penguatan Kapasitas Masyarakat”.
2	Awareness, capacity building, and training	2.2	Report on capacity building for improved fishery and mangrove management, including agenda, participants (with name and gender), and summary results.	Laporan Penguatan kapasitas masyarakat terkait pengelolaan mangrove laut dan pesisir termuat dalam Laporan Pengorganisasian dan Penguatan Kapasitas Masyarakat. Disisi lain diakhir program pelatihan olahan buah mangrove dan kegiatan rehabilitasi mangrove juga sudah dilaksanakan (laporan kegiatan terlampir)
2	Awareness, capacity building, and training	2.3	Report on training in alternative livelihoods, including topics of training, names and gender of participants	Pelatihan Usaha alternatif budidaya perikanan ramah lingkungan telah dilaksanakan dan suda diserahkan dalam laporan periode sebelumnya. Kegiatan pelatihan ini merupakan persiapan awal bagi kelompok nelayan di 2 (dua) desa program. Tujuan utama kegiatan pelatihan ini lebih diarahkan untuk memberikan penguatan kepada kelompok nelayan sebagai ujung tombak dalam proses-proses memaksimalkan pengelolaan konservasi pesisir dan laut berbasis masyarakat di 2 (dua) desa program. Melalui pelatihan ini diharapkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut secara adil dan lestari. Disisi lain kegiatan pelatihan ini untuk meningkatkan hasil tangkap dan pendapatan nelayan, sehingga dengan cara-cara tangkap yang ramah lingkungan usaha pengelolaan sumberdaya laut akan terus berkelanjutan. Dalam kegiatan sehari-hari praktek usaha Karamba Jaring apung juga sudah dilakukan oleh beberapa kelompok di desa Uwedikan, namun kegiatan yang dilakukan sedikit terkendala dengan modal usaha, terutama pakan dan pengadaan fasilitas KJA, sehingga rencana kegiatan usaha ini sedikit mengalami kendala. Untuk saat ini kelompok yang sudah dilatih telah mendapat dukungan untuk pengembangan usaha KJA di desa Lambangan dan Bagan di desa Uwedikan
3	Creation of MPAs in Lambangan and Uwedikan	3.1	Delineation document for MPA Lambangan	Dokument yang dihasilkan dari proses perencanaan pengelolaan daerah perlindungan laut di desa Lambangan adalah berupa SK (Surat Keputusan) kepala desa Lambangan dan RANPERDES (Rancangan Peraturan Desa)

				<p>yang sekarang sudah ditetapkan menjadi Perdes, terkait Peraturan desa tentang pengelolaan zonasi di wilayah DPL. (dokument SK dan PERDES terlampir). Proses keluarnya SK dan adanya Peraturan Desa ini, dilakukan melalui beberapa tahap sampai pada penetapan SK dan penetapan Perdes. Salah satu proses untuk menetapkan SK Pengelolaan DPL adalah loka karya yang dilaksanakan didesa. Surat Keputusan pembentukan Badan atau Kelompok Pengelola DPL juga turut ditandatangani oleh Camat wilayah kecamatan Pagimana, Kapolsek Pagimana dan perwakilan Koramil Kecamatan Pagimana. Saat ini Peraturan desa dimasing-masing desa program sudah dierlakukan dan diawali dengan beberapa kegiatan sosialisasi. Pengesahan dan penetapan serta pemberlakuan Peraturan Desa yang telah disahkan oleh Pemerintah Desa ini ditindak lanjuti sampai ke pemerintah kabupaten sebagai syarat hukum pemberlakuan sebuah Peraturan Desa. Tertuang dalam SK dan Perdes adalah perencanaan dan pengelolaan DPL untuk desa Lambangan.</p>
3	Creation of MPAs in Lambangan and Uwedikan	3.2	Management plan for MPA Lambangan	<p>Salah satu bentuk Perencanaan pengelolaan DPL desa Lambangan adalah dengan terbentuknya kelompok pengelola DPL desa Lambangan. Kemudian dikuatkan dengan terbitnya SK kepala desa. Untuk memastikan perencanaan pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat didesa Lambangan, peran dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok kemudian diatur dalam sebuah kerangka peraturan pengelolaan dan kesepakatan zonasi di wilayah desa Lambangan yang saat ini sudah ditetapkan dan diberlakukan menjadi Peraturan Desa. Perencanaan pengelolaan DPL dilaksanakan dengan penetapan beberapa titik zonasi. Penetapan zonasi dilaksanakan melalui beberapa kali musyawarah desa bersama komunitas masyarakat yang ada didesa. Salah satu komunitas yang sangat bersentuhan langsung dengan persoalan pengelolaan pesisir dan laut adalah komunitas nelayan. Musyawarah ini untuk memastikan dan menentukan bentuk pengelolaan konservasi yang dilaksanakan dengan beberapa kali pertemuan awal dan diskusi ditingkat dusun. Hasil kesepakatan dusun kemudian dibawah dalam sebuah forum musyawarah ditingkat desa untuk memastikan dan menyepakati model pengelolaan DPL. Perencanaan Pengelolaan DPL desa Lambangan tertuang dalam lampiran Dokument Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat desa Lambangan</p>

3	Creation of MPAs in Lambangan and Uwedikan	3.3	Legal declaration of MPA Lambangan	Kesepakatan pengelolaan DPL wilayah desa Lambangan dengan dukungan stakeholder yang ada didesa dan kecamatan Pagimana ditindaklanjuti dengan kegiatan Lokakarya yang dilaksanakan ditingkat desa dan juga ditingkat kabupaten. Kegiatan ini untuk memastikan adanya dukungan dan legitimasi pemerintah daerah terkait kesepakatan pengelolaan DPL didesa Lambangan yang berada diwilayah administrasi pemerintah kabupaten Banggai. (Secara rinci Laporan Loka Karya terlampir). Kehadiran Bupati Banggai dalam pelaksanaan Lokakarya telah memberikan respon dan dukungan positif terhadap penetapan kawasan konservasi di 2 (dua) wilayah desa program. Dalam perencanaan awal pemerintah propinsi Sulteng bahwa desa Lambangan akan dimasukkan dalam Perda Rencana Zonasi Wilayah Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Sulteng, namun setelah ditetapkan belum terakomodir, tetapi perencanaan wilayah konservasi DPL desa lambangan mendapat respon dengan adanya surat Rekomendasi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Tengah sebagai kawasan konservasi. (Rekomendasi terlampir)
3	Creation of MPAs in Lambangan and Uwedikan	3.4	Delineation document for MPA Uwedikan	Sebagaimana desa Lambangan, Dokument yang dihasilkan dari proses perencanaan pengeloaan daerah perlindungan laut didesa Uwedikan adalah berupa SK (Surat Keputusan) kepala desa Lambangan dan RANPERDES (Rancangan Peraturan Desa) yang sekarang sudah ditetapkan menjadi Perdes, terkait Peraturan desa tentang pengelolaan zonasi diwilayah DPL. (dokument SK dan PERDES terlampir). Proses keluarnya SK dan adanya Peraturan Desa ini, dilakukan melalui beberapa tahap sampai pada penetapan SK dan penetapan Perdes. Salah satu proses untuk menetapkan SK Pengelolaan DPL adalah loka karya yang dilaksnakan didesa. Surat Keputusan pembentukan Badan atau Kelompok Pengelola DPL juga turut ditandatangani oleh Camat wilayah kecamatan Luwuk Timur, Kapolsek Luwuk Timur dan perwakilan Koramil Kecamatan Luwuk Timur. Saat ini Pertauran desa dimasing-masing desa program sudah dierlakukan dan diawali dengan beberapa kegiatan sosialisasi. Pengesahan dan penetapan serta pemberlakuan Peraturan Desa yang telah disahkan oleh Pemerintah Desa ini ditindak lanjuti sampai keperintah kabupaten sebagai syarat hukum pemberlakuan sebuah Peraturan Desa. Tertuang dalam SK dan Perdes adalah perencanaan dan pengelolaan DPL untuk desa Lambangan.

3	Creation of MPAs in Lambangan and Uwedikan	3.5	Management plan for MPA Uwedikan	Bentuk Perencanaan pengelolaan DPL desa Uwedikan juga dilakukan dengan terbentuknya kelompok pengelola DPL desa Uwedikan. Kemudian dikuatkan dengan terbitnya SK kepala desa. Untuk memastikan perencanaan pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat didesa Uwedikan, peran dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok kemudian diatur dalam sebuah kerangka peraturan pengelolaan dan kesepakatan zonasi diwilayah desa Uwedikan yang saat ini sudah ditetapkan dan diberlakukan menjadi Peraturan Desa. Perencanaan pengelolaan DPL dilaksanakan dengan penetapan beberapa titik zonasi. Penetapan zonasi dilaksanakan melalui beberapa kali musyawarah desa bersama komunitas masyarakat yang ada didesa. Salah satu komunitas yang sangat bersentuhan langsung dengan persoalan pengelolaan pesisir dan laut adalah komunitas nelayan. Musyawarah ini untuk memastikan dan menentukan bentuk pengelolaan konservasi yang dilaksanakan dengan beberapa kali pertemuan awal dan diskusi ditingkat dusun. Hasil kesepakatan dusun kemudian dibawah dalam sebuah forum musyawarah ditingkat desa untuk memastikan dan menyepakati model pengelolaan DPL. Perencanaan Pengelolaan DPL desa Uwedikan tertuang dalam lampiran Dokument Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat desa Uwedikan
3	Creation of MPAs in Lambangan and Uwedikan	3.6	Legal declaration of MPA Uwedikan	Sama seperti desa Lambangan, kesepakatan penetapan pengelolaan DPL wilayah desa Uwedikan oleh pemerintah desa dengan dukungan stakeholder yang ada didesa dan kecamatan Pagimana ditindaklanjuti dengan kegiatan Lokakarya yang dilaksanakan ditingkat desa dan juga ditingkat kabupaten. Kegiatan ini juga untuk memastikan adanya dukungan dan legitimasi pemerintah daerah terkait kesepakatan pengelolaan DPL didesa Uwedikan yang berada diwilayah administrasi pemerintah kabupaten Banggai. Secara detail laporan kegiatan lokakarya terlampir dalam laporak kegiatan lokakarya yang merupakan bagian dari sebuah deklarasi dan dukungan pemerintah baik, dari tingkat desa juga dukungan pemerintah daerah. Dalam perencanaan pemerintah propinsi Sulteng , desa Uwedikan juga dimasukan dalam Perda Rencana Zonasi Wilayah Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Sulteng
4	CEPF safeguard on involuntary restriction on	4.1	4.1. Semi-annual update on process	Dalam memastikan kerangka proses terhadap pelaksanaan program terkait dengan kepastian jaminan terhadap hak-hak masyarakat dan perlindungan

	access to resources		framework	lingkungan, kegiatan ini dilakukan dengan tehnik monitoring dan kunjungan lapangan yang dilakukan oleh tehnik advisor dan direktur Japesda. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan seiring pelaksanaan kegiatan dilapangan yang dilaksanakan saat kegiatan survei mangrove dan terumbu karang, saat pelatihan kelompok nelayan dan pelaksanaan lokakarya. Disisi lain untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai proses dan kerangka kerja, juga dilakukan rapat-rapat evaluasi internal bersama seluruh pelaksana program yang dilaksnakan secara rutin baik dikantor Japesda diGorontalo juga yang ada diluwuk.
5	Capacity development of JAPESDA on organization and program management	5.1	5.1. Baseline & endline civil society tracking tools	Data CSST terlampir dalam laporan ini. Untuk melihat perkembangan oragnisasi masyarakat sipil dalam hal ini kapasitas JAPESDA dilakukan melalui tools CSST terlampir. Dalam periode sebelumnya sudah dilaporkan juga terkait kapasitas Japesda terutama dalam pelaksanaan program melalui pengembangan tools ini.

Please describe and submit any tools, products, or methodologies that resulted from this project or contributed to the results.

Beberapa hasil produk dari pelaksanaan selama proyek ini sudah dan akan dikirim dalam laporan ini. Selama pelaksanaan proyek hasil atau prodak yang dihasilkan antara lain :

- **Peta hasil pemetaan dan kajian desa Partisipatif**

Peta dan hasil kajian desa partisipatif yang dihasilkan dari kegiatan bersama masyarakat dan pemerintah desa adalah sebuah hasil yang diperoleh melalui kegiatan pemetaan partisipatif dan kajian desa secara partisipatif. Peta yang dihasilkan berdasarkan petunjuk masyarakat dan pemerintah desa adalah sebuah sketsa desa kondisi sumberdaya alam yang digambarkan oleh masyarakat dan pemerintah desa, dan menjadi bahan pembelajaran bersama masyarakat dalam melakukan pemetaan wilayah atau kondisi sumberdaya yang ada didesa. Sehingga secara tidak langsung masyarakat bisa memahami kondisi wilayah dan sumberdaya yang ada serta seberapa luas wilayah desa mereka.

- **Peta hasil perencanaan dan penetapan wilayah zonasi DPL**

Peta ini dihasilkan berdasarkan pemetaan wilayah desa dan juga hasil survei dan pemetaan terhadap kesepakatan wilayah yang akan dikonservasi, termasuk peta sumberdaya alam.

- **Hasil Kajian Mangrove, Terumbu Karang dan Lamun kabupaten Banggai**

Hasil kajian Mangrove dan Terumbu karang berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh konsultan dari Universitas Negeri Gorontalo dan Universitas Muhamadiyah Gorontalo yang sudah dilaporkan sebelumnya

- **Foto/Dokumentasi kegiatan**
- **Foto atau dokumentasi kegiatan adalah dokumentasi kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan program.**
- **Dokument SK (Surat Keputusan) kepala Desa Lambangan dan Uwedikan terkait penetapan Badan atau kelompok Pengelola DPL yang turut ditandatangani Camat, Kapolsek dan pihak Koramil masing-masing kecamatan Luwuk Timur dan kecamatan Pagimana**

- Dokument Legal Drafting RANPERDES (Rancangan Peraturan Desa) terkait pengelolaan DPL desa Lambangan dan Uwedikan
- Dokument Perdes yang telah ditetapkan pemerintah
- Perda tentang RZWP3K propinsi Sulawesi Tengah
- Surat Rekomendasi kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tengah terkait penetapan pesisir dan laut desa Lambangan sebagai wilayah konservasi

Lessons Learned

Describe any lessons learned during the design and implementation of the project, as well as any related to organizational development and capacity building.

Consider lessons that would inform:

- Project Design Process (*aspects of the project design that contributed to its success/shortcomings*)
- Project Implementation (*aspects of the project execution that contributed to its success/shortcomings*)
- Describe any other lessons learned relevant to the conservation community

Implementasi projek CPEF telah banyak memberikan kontribusi bagi peningkatan kapasitas baik lembaga maupun individu pelaksana program. Dalam pengalaman selama melakukan inisiatif program pendampingan hal atau pembelajaran menarik yang dilakukan adalah bagaimana membuat suatu kesepakatan dengan masyarakat dalam suatu desa bersama pemerintah setempat. Bagi Japesda sendiri menginisiatif suatu wilayah pesisir menjadi area konservasi adalah sesuatu hal yang baru dilakukan. Hal ini tentu sangat banyak membutuhkan strategi dan tehnik khusus bagaimana inisiatif sebuah wilayah pesisir yang dikelola masyarakat dengan model pengelolaan yang tidak ramah lingkungan, kemudian diinisiatif menjadi area yang diatur bersama pengelolaannya dengan pola pemanfaatan yang berkelanjutan. Tantangan dan hambatan telah banyak memberikan pelajaran menarik dalam proses-proses pendampingan selama pelaksanaan program sampai pada tahap membuat kesepakatan bersama terkait area kelola DPL. Salah satu tantangan adalah, bagaimana melakukan pendekatan terhadap para pelaku ilegal fishing terutama warga desa setempat. Kegiatan pemanfaatan hutan mangrove secara berlebihan dengan pola pemanfaatan jual beli kayu mangrove adalah tantangan besar yang dihadapi para pendamping dilapangan. Bahkan ancaman secara fisik pernah dialami, namun berkat proses pendampingan dengan model pendekatan secara intensif dan melibatkan para pelaku dalam proses-proses kegiatan lapangan, pada akhirnya keterlibatan mereka dalam pelaksanaan kegiatan justru menjadi membuat para pelaku ini banyak yang berbalik menjadi person terdepan dalam menjaga dan menyepakati adanya wilayah konservasi pesisir didsa mereka. Dalam proses pengembangan DPL banyak para pelaku ilegal fishing ini akhirnya masuk dan terlibat dalam keanggotaan Badan atau Kelompok Pengelola DPL yang ada di 2 (dua) desa program. Hal lain yang menarik dan menjadi pengalaman selama proses pengembangan DPL dalam penyiapan masyarakat untuk pengelolaan mangrove dan pesisir berkelanjutan adalah bagaimana membangun jaringan dan komunikasi dengan berbagai pihak terkait, baik didesa dan didaerah, dengan posisi lembaga JAPESDA “dianggap” sebagai lembaga dari luar daerah provinsi Sulawesi Tengah. Banyak pertanyaan dan juga tantangan dari berbagai pihak terkait aktifitas dilapangan dan kegiatan yang

dilakukan. Namun dengan pola dan model pendampingan dan komunikasi secara intensif dengan berbagai pihak akhirnya semua tantangan dapat dilalui dengan baik dan menemukan titik temu sebuah kesepakatan bersama baik dari pemerintah desa dan masyarakat, pemerintah kecamatan, kabupaten dan provinsi serta stakeholder terkait akan adanya wilayah konservasi dengan modal pengelolaan DPL berbasis masyarakat di 2 (dua) desa kabupaten Banggai Sulawesi Tengah. Menghadapi para pelaku ilegal fishing dari luar desa juga mejadi pembelajaran menarik terkait proses-proses pengembangan DPL di 2 (dua) desa program. Salah metode yang dilakukan adalah disamping memperkuat posisi masyarakat dan pemerintah desa, membangun jaringan dan komunikasi dengan berbagai pihak luar dalah cara yang strategis dilakukan. Hal ini terutama dilakukan dengan pihak parat penegak hukum diwilayah kerja desa dan kecamatan masing-masing wilayah program. Menghadirkan pihak terkait dari luar desa dalam pertemuan-pertemuan kampung terutama pihak desa tetangga dan aparat penegak hukum setempat, baik pihak pemerintah desa tetangga dan dari aparat penegak hukum dari kepolisian kecamatan. Terutama hal ini untuk menghadapi para pelaku ilegal fishing (para pelaku bom ikan dan pengambilan karang oleh warga dari luar desa). Sehingga dengan model inisiatif seperti ini tekanan terhadap aktifitas bom, potasium dan pengambilan karang banyak berkurang tidak hanya diwilayah desa program, namun juga tekanan ini juga mulai berkurang di beberapa tempat terutama desa-desa tetangga. Keterlibatan pihak aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian sektor atau kecamatan dalam proses pembentukan dan membangun kesepakatan pengelolaan DPL sangat membantu proses-proses kegiatan-kegiatan dilapangan. Dalam beberapa kegiatan peningkatan kapasitas organisasi oleh mitra CPEF sangat mendukung proses-proses kegiatan dilapangan, terutama terkait dengan kegiatan-kegiatan arahan strategis yang berhubungan dengan konservasi laut dan pesisir sebagaimana dalam perencanaan yang dilaksanakan diwilayah pesisir kabupaten Banggai. Proses kegiatan penguatan disamping menjadi media belajar bersama, juga meningkatkan kapasitas organisasi terutama bagi pelaksana program. Disis lain pembelajaran bersama masyarakat dilapangan juga cukup mendukung bagi peningkatan kapasitas organisasi, baik organisasi pemerintah didesa program, organisasi masyarakat lokal dan juga pembelajaran dan peningkatan kapasitas bagi pelaksana program.

Sustainability / Replication

Summarize the success or challenges in ensuring the project will be sustained or replicated, including any unplanned activities that are likely to result in increased sustainability or replicability.

Selama proses pelaksanaan program keberhasilan dan tantangan selama pelaksanaan projek menjadi catatan sendiri selama perjalanan kegiatan penyiapan masyarakat dalam pengelolaan mangrove dan sumberdaya pesisir dan laut berkelanjutan. Beberapa catatan keberhasilan antara lain adanya kesepakatan wilayah kelola yang dikonservasi seluas 744.57ha, dari 100 ha yang yang direncanakan. Keberhasilan ini tercapai tentu tidak sebatas sebuah catatan diatas kertas. Proses penyiapan awal sampai pada tahap akhir menginisiatif sebuah kesepakatan wilayah kelola DPL merupakan kerja-kerja yang penuh tantangan, yang pada akhirnya membuahkan sebuah kesepakatan terkait DPL berbasis masyarakat. Catatan lain keberhasilan selama pelaksanaan projek adalah membangun jaringan dengan berbagai pihak terkait. Dengan komunikasi dan jaringan dengan berbagai pihak terkait beberapa kegiatan permintaan untuk mereplikasi kegiatan yang sama banyak diminta untuk dilakukan didesa-desa tetangga oleh pihak pemerintah desa dan juga dari pemerintah daerah. selama pelaksanaan program sampai pada tahap membuat kesepakatan bersama terkait area kelola DPL. Sebagaimana dalam catatan pemebelajaran menarik, salah satu tantangan adalah, bagaimana melakukan

pendekatan terhadap para pelaku ilegal fishing terutama warga desa setempat. Kegiatan pemanfaatan hutan mangrove secara berlebihan dengan pola pemanfaatan jual beli kayu mangrove adalah tantangan besar yang dihadapi para pendamping lapangan. Bahkan ancaman secara fisik pernah dialami, namun berkat proses pendampingan dengan model pendekatan secara intensif dan melibatkan para pelaku dalam proses-proses kegiatan lapangan, pada akhirnya keterlibatan mereka dalam pelaksanaan kegiatan justru menjadi membuat para pelaku ini banyak yang berbalik menjadi person terdepan dalam menjaga dan menyepakati adanya wilayah konservasi pesisir didesa mereka. Dalam proses pengembangan DPL banyak para pelaku ilegal fishing ini akhirnya masuk dan terlibat dalam keanggotaan Badan atau Kelompok Pengelola DPL yang ada di 2 (dua) desa program. Dalam proses membangun komunikasi dan jaringan bersama pemerintah daerah adalah salah satu keberhasilan bisa melibatkan pemerintah daerah dalam proses kegiatan. Bahkan beberapa proses kegiatan lapangan suport data dan informasi menjadi dukungan dalam pelaksanaan kegiatan, hal ini terutama data dan informasi terkait wilayah kelola mangrove dan luasan di wilayah dampingan program (peta dan data luas mangrove). Salah satu dukungan pemerintah dari provinsi dalam hal ini dinas Perikanan dan Kelautan, adalah terealisasinya kegiatan rehabilitasi atau transplantasi karang bersama didesa Uwedikan juga adanya penetapan desa Uwedikan masuk dalam pencadangan area konservasi sebagaimana Perda RZWP3K dan surat Rekomendasi kepala dinas Kalautan dan Perikan propinsi sulawesi Tengah untuk desa Lambangan sebagai kawasan konservasi DPL. Dengan adanya kebijakan pemerintah desa, daerah dan propinsi keberlanjutan dan replikasi program semoga akan berkelanjutan

Safeguards

If not listed as a separate Project Component and described above, summarize the implementation of any required action related to social, environmental, or pest management safeguards

Dalam implementasi kegiatan selama pelaksanaan proyek, perlindungan sosial dan lingkungan yang diambil adalah dengan melakukan evaluasi dan monitoring lapangan yang dilakukan oleh Chief Tehnical Advisor bersama Project Supervisor. Monitorng lapangan terhadap implementasi program lebih diarahkan terhadap kesiapan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pengelolaan wilayah konservasi didesa dan perencanaan protec area DPL. Dalam perencanaan pengelolaan DPL berbasis masyarakat salah satu komponen penting adalah bagaimana memberikan jaminan kepada masyarakat terhadap akses pengelolaan yang disepakati secara musyawarah dengan pertimbangan pengelolaan pesisir dan laut yang adil dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang ditempuh dalam memberikan perlindungan jaminan sosial dan lingkungan adalah, dengan melibatkan unsur masyarakat desa setempat bersama pemerintah desa sebagai pemeran utama dalam kontribusi pengembangan wilayah DPL. Untuk memberikan perlindungan sosial dan lingkungan upaya yang dilakukan diluar perencanaan project adalah melakukan upaya advokasi lingkungan, dengan membangun jaringan dan komunikasi dengan pihak aparaturnegak hukum ditingkat kecamatan. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi tekanan ilagal fishing oleh pihak-pihak luar desa yang sering melakukan kegiatan yang merusak lingkungan pesisir dengan kegiatan pemboman ikan dan potasium serta pemanfaatan hutan mangrove dan terumbu karang secara berlebihan. Bentuk advokasi ini tentu untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak masyarakat lokal terhadap sumberdaya pesisir dan laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat terutama yang ada di 2 (dua) wilayah desa program. Sementara hal yang terpenting dalam setiap pengambilan keputusan diperencanaan program kesepakatan warga adalah hal yang mutlak terus dipastikan

Additional Comments/Recommendations

Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your project or CEPF

Penyiapan masyarakat dalam pengelolaan mangrove dan sumberdaya pesisir berkelanjutan telah banyak memberikan kontribusi positif bagi pengelolaan pesisir dan laut dikabupaten Banggai khususnya wilayah desa Uwedikan dan Lambangan. Salah satu rekomendasi adalah memberikan penguatan bagi penguatan pengelolaan kesepakatan DPL dan penguatan kapasitas bagi pengelola. Terbentuknya kelompok pengelola DPL atau Kawasan Konservasi Perairan bersama model pengelolaan Zonasi didesa Lambangan dan Uwedikan merupakan kesepakatan bahkan “keinginan” masyarakat terutama nelayan yang selama ini merasa wilayah tangkap mereka terganggu dan dirusak oleh kebanyakan dari orang-orang dari luar desa. Oleh karena itu keinginan yang penuh semangat oleh khususnya komunitas nelayan yang merasakan dampak langsung terkait pemanfaatan dan pengelolaan pesisir ini perlu didukung dan mendapat perhatian serius dari para pihak terkait. Dalam beberapa pertemuan bersama pemerintah daerah support atau dukungan secara moril sudah disampaikan untuk keberlanjutan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan atau keberadaan DPL yang sudah diinisiasi bersama pemerintah desa tersebut. Salah satu dorongan pemerintah daerah adalah mendukung pemerintah desa untuk mengalokasikan Dana Desa bagi pengelolaan wilayah konservasi pesisir. Namun hal ini terkendala dengan persoalan teknis proses pengelolaan dana desa, sehingga membutuhkan proses dan waktu yang cukup panjang. Disisi lain kebutuhan terhadap pengelolaan kawasan konservasi yang baru saja disepakati pengelolaannya perlu segera ditindaklanjuti dengan berbagai aktifitas yang mendukung proses-proses kegiatan dilapangan. Salah satu rekomendasi pengelolaan DPL di 2 (dua) desa tersebut adalah memastikan peran dan tanggung jawab dari kelompok pengelola bisa berjalan secara maksimal. Kondisi ini tentu membutuhkan berbagai metode dan fasilitas pendukung dalam memastikan kerja-kerja badan pengelola. Salah satu dari perencanaan wilayah konservasi yang sudah disepakati ini adalah pemberian tanda atau batas-batas zonasi wilayah kelola yang telah ditetapkan dalam model pengelolaan DPL atau KKP untuk memastikan kawasan ini berada dalam kawasan konservasi. Sehingga dalam implementasi pengelolaan wilayah konservasi ini tidak akan banyak berbenturan dengan persoalan-persoalan pengelolaan yang merusak dilapangan dan model pengawasan yang dilakukan oleh kelompok pengelola bisa berjalan secara maksimal. Dalam perencanaan bersama juga dengan DKP Provinsi Sulteng telah dilakukan rehabilitasi karang terhadap wilayah DPL atau KKP desa Uwedikan. Oleh karena itu melihat antusias dan semangat warga desa terutama pemerintah desa bersama komunitas nelayan dan kelompok pengelola, support program CEPF dan dukungan Pemerintah serta seluruh pihak masih sangat dibutuhkan terutama untuk menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan yang telah ada. Dalam beberapa pertemuan bahkan beberapa masyarakat dan pemerintah desa tetangga sangat berkeinginan untuk menerapkan pola konservasi yang dilakukan didesa Lambangan dan Uwedikan

Additional Funding



Provide details of any additional funding that supported this project and any funding secured for the project, organization, or the region, as a result of CEPF investment

Total additional funding (US\$)

Type of funding

Please provide a breakdown of additional funding (counterpart funding and in-kind) by source, categorizing each contribution into one of the following categories:

- A Project Co-Financing (other donors or your organization contribute to the direct costs of this project)*
- B Grantee and Partner Leveraging (other donors contribute to your organization or a partner organization as a direct result of successes with this CEPF funded project)*
- C Regional/Portfolio Leveraging (other donors make large investments in a region because of CEPF investment or successes related to this project)*

Information Sharing and CEPF Policy

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned, and results. Final project completion reports are made available on our Web site, www.cepf.net, and publicized in our newsletter and other communications.

1. Please include your full contact details (Name, Organization, Mailing address, Telephone number, E-mail address) below

**Ahmad Bahsoan Perkumpulan JAPESDA 081340567916 (email : japesda@yahoo.com
matbahsoan@yahoo.com)**